

BAB III

PENYEBAB BRITAIN EXIT (BREXIT) PADA TAHUN 2016

Organisasi Internasional dibentuk oleh anggota masyarakat internasional berdasarkan kesamaan dalam kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara anggota. Begitupun dengan Uni Eropa yang dibentuk karena memiliki penderitaan yang sama setelah perang dunia ke dua. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi tersebut memiliki masalah internal yang membuat anggota-anggotanya mencari jalan keluar bersama atau mencari jalan keluar sendiri dalam menemukan solusinya. Inggris menjadi contoh bahwa negara merasa terbebani dengan kebijakan yang diputuskan oleh Uni Eropa. Sehingga Inggris mencari jalan keluar untuk menemukan solusi yang tepat. Solusi yang ditawarkan oleh David Cameron yang saat itu terpilih sebagai perdana menteri Britania Raya dan seorang pemimpin Partai Konservatif *United Kingdom Independence Party* (UKIP) adalah melaksanakan referendum di Inggris dan berakhir pada keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan menjelaskan kronologi terjadinya *Britain Exit* (BREXIT) pada tahun 2016.

A. Inggris: Sejarah dan Perkembangannya

Inggris merupakan negara kerajaan yang tergabung dengan Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara bernama *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*. Ibukota Inggris adalah London dan sistem pemerintahan yang diterapkan adalah Monarki Konstitusional. Luas wilayah Britania Raya mencapai $\pm 244.820 \text{ km}^2$. Batas wilayah yang berada di Utara adalah Samudra Atlantik, di selatan dengan Selat Inggris, di sebelah timur, Laut Utara dan sebelah barat, Samudra Atlantik. Kota-kota besar yang berada di Inggris adalah London, Manchester, Liverpool, Bristol, Nottingham, Leicester, Birmingham, Leeds, Sheffield. Penduduk asli yang berada di kawasan Britania Raya merupakan bangsa *Kelt* yang

merupakan keturunan dari Skotlandia, Irlandia, Wales dan bangsa Jerman, Anglo Saxon, Jute, Denmark, Norman. Pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk yang dimiliki sebesar 63.742.977 jiwa dan semakin bertambah setiap tahunnya akibat gelombang imigran yang masuk ke negara mereka. (Pambudi, 2017)

Gambar 3.1
Letak Geografis Britania Raya



Sumber : www.easynotecards.com
(https://www.easynotecards.com/print_list/24521)

Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di benua eropa dan merupakan negara bagian dari Britania Raya yang terbagi dari Wales, Skotlandia, dan, Irlandia Utara. Britania Raya merupakan simbol negara kerajaan yang diperjuangkan dari abad ke-10 oleh Raja Anglo-Saxon Athelstan. Kekuasaan Inggris yang selama berabad-abad menaklukan kerjaan dari Wales, Skotlandia dan Irlandia, berakhir pada kesetiaan kerjaan Celtic untuk membentuk Britania Raya sebagai simbol negara-negara kerjaan. Wales merupakan negara yang pertama kali bergabung dengan Inggris

melalui *Acts of Union* pada tahun 1536-1542. Kemudian diikuti oleh Skotlandia yang sudah dikuasai oleh kerajaan Inggris pada tahun 1603 untuk ikut menjadi bagian dari Inggris dan Wales membentuk kerajaan Inggris pada tahun 1707. Irlandia sebagai negara terakhir yang ikut membentuk kerajaan Inggris melalui *Acts of Union* pada tahun 1800 walaupun enam dari sembilan kabupaten Ulster yang hanya tergabung ke Britania Raya sebagai Irlandia Utara (Josephson, 2018).

Acts of Union merupakan Undang-Undang Parlemen yang disahkan oleh Inggris dan Skotlandia mengenai proses akses ke dalam kerajaan Inggris Raya. Awal mulanya, Skotlandia merasa takut untuk menjadi bagian dari Inggris karena hanya akan menjadi wilayah lain dibagian Inggris. Begitupun Inggris merasa takut dengan tentara yang dimiliki oleh Skotlandia. Ketakutan utama Inggris jika Skotlandia yang memiliki kekuatan tentara yang besar beraliansi dengan Prancis akan melahirkan kembali Aliansi Auld. Namun memasuki 1700 Skotlandia kehilangan kekuatan perekonomian dan hal ini menjadi suatu lintasan bagi Inggris untuk menyakinkan kembali Skotlandia untuk bergabung pada kerajaan Inggris. Meskipun Skotlandia bergabung ke dalam kerajaan Inggris, mereka tetap mempertahankan kemandirian sistem hukum dan keagamaannya namun, mata uang, perpajakan, kedaulatan, perdagangan, parlemen dan bendera dikombinasikan menjadi satu. (Johnson, 2018).

Inggris adalah negara yang menerapkan sistem Monarki Konstitusional yang sebelumnya memakai Monarki Absolut. Inggris memiliki dua kekuasaan eksekutif, Pertama kekuasaan tertinggi dipegang oleh Raja/Ratu dan kedudukannya tidak bisa diganggu gugat. Kedua, kekuasaan Eksekutif, dipimpin oleh perdana menteri yang saat ini diamanahkan kepada Theresa May yang akan memimpin menteri-menteri. Menteri adalah anggota *House of Commons* yang diangkat dari badan legislatif melalui sistem pemilu dan harus dari partai mayoritas yang dipilih oleh rakyat. Monarki Konstitusional yang dijalankan oleh Inggris melemahkan peran Raja/Ratu dalam mencampur urusan politik. Namun sistem ini membuat peran Perdana

Menteri dalam bidang politik semakin besar. Sebelum Monarki Konstitusional, Inggris masih menerapkan Monarki Absolut sehingga segala bentuk kepemimpinan di pegang sepenuhnya oleh Raja/Ratu. Oleh karena itu sistem ini digantikan dengan Monarki Konstitusional agar Perdana Menteri yang akan lebih menonjol apabila berurusan dalam bidang politik. (Setyowati, 2017, p. 5&6)

Inggris menerapkan sistem bikameral (sistem dua kamar) *House of Lords* (Majelis Tinggi) dan *House of Commons* (Majelis Rendah). Anggota *House of Lords* ditunjuk langsung oleh Raja/Ratu yang berasal dari para bangsawan, Uskup Agung Gereja, dan orang yang diangkat atas jasa dan prestasi terhadap negara. Sedangkan anggota *House of Commons* diangkat oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum yang terbagi di beberapa wilayah dengan masa jabatan lima tahun (Indonesia, 2010). *House of Lords* memiliki 760 anggota yang terbagi dari 646 *Life Peers*, 25 *Archbishops and Bishops*, dan 92 *Hereditary Peers*. Anggota Majelis Tinggi harus memiliki usia minimum 21 tahun dan merupakan warga negara asli dari Inggris, Irlandia, Negara Persemakmuran, Bangsawan, Uskup Agung dan Uskup di Gereja. (Senat, 2018). Sedangkan Majelis Rendah memiliki anggota sebanyak 650 orang yang diwakili 1 orang dari setiap daerah pilihan. Daerah pilihan yang ada di Inggris Raya sebanyak 650 daerah. 533 berada di Inggris, 59 di Skotlandia, 40 di Wales dan 18 di Irlandia Utara. (BBC, 2015)

Dalam pembuatan Undang-Undang di Inggris, harus mendapat kesepakatan dari HoC dan HoL sebelum dikirim kepada Raja/Ratu untuk mendapatkan persetujuan atau *Royal Assent*. Mekanisme pertama dalam pengusulan melalui *Member of Parliament* atau Menteri Kabinet dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang dalam bentuk *Green Paper* kemudian dibawa kepada Komite Legislasi agar RUU menjadi *White Paper* yang diusulkan dapat memenuhi syarat untuk dapat dibacakan pada *Queens Speech*. Setelah itu akan ada rangkaian pembacaan di depan *House of Commons* dan *House of Lords* dan pada akhirnya mendapatkan persetujuan dari Ratu atau disebut sebagai *Royal Assent*. (Politics, 2018)

Inggris memiliki kekuatan dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Pada zaman perang dunia pertama, Inggris memiliki kekuatan industri terbesar dan hal tersebut membuat Jerman menjadi iri. Dalam upaya menyaingi kekuatan Inggris, Jerman membuat suasana politik antara mereka menjadi panas. Sehingga dari persaingan kedua negara tersebut Inggris dan Jerman, mencoba untuk menjajah negara lain untuk memenuhi kebutuhan industri yang dibutuhkan mereka. Pada akhirnya pada tahun 1870, Jerman mencoba menguasai wilayah Prancis, Sungai Rhein yang akhirnya dimenangkan oleh Jerman. Akibat dari kejadian ini, Prancis dan Inggris membentuk aliansi untuk menyerang Jerman. Namun, Jerman pada tahun 1882 membentuk aliansi yang disebut *Tripple Alliance* (Italia, Jerman, Austria, Hongaria).

Melihat *Tripple Alliance* telah dibentuk, Inggris dan Prancis menambah aliansi dari negara Rusia yang disebut *Tripple Entente*. Aliansi-aliansi yang dibentuk oleh negara-negara eropa merubah persaingan ekonomi mereka menjadi persaingan politik. Selanjutnya pada tahun 1914 mejadi tahun yang mengawali perang dunia pertama. Hal ini dikarenakan Raja Austria Franz Ferdinand dibunuh oleh Gavrillo Princip dari Serbia. Sehingga Austria menekan Serbia untuk menyerahkan Gavrillo kepada mereka. Tetapi Gavrillo mendapat perlindungan dari Serbia. Akhirnya perang terjadi antara Austria dan Serbia serta melibatkan aliansi-aliansi yang ada di eropa. Austria beraliansi dengan *Tripple Alliance* dan Serbia bersama aliansi *Tripple Entente*. (Pinem, 2016)

Setelah perang dunia I selesai melalui *Treaty of Versailles* pada tanggal 28 Juni 1919 menyatakan bahwa perang dunia yang baru terjadi disebabkan oleh Jerman, Austria dan Bosnia. Namun, setelah perjanjian gencatan senjata dilakukan, perang dunia II kembali berlanjut. Hal ini dikarenakan adanya paham fasisme yang disebarkan oleh Jerman dan Italia untuk menyerang Polandia pada tanggal 1 september 1939. Setelah penyerangan dilakukan,2 hari setelahnya Prancis dan Inggris kembali menyatakan perang terhadap Jerman. Perang yang dilakukan Inggris untuk menahan invansi dan mempertahankan

aliansi membuat keadaan negara Inggris menjadi krisis ekonomi dan politik. (Staff, 2018) Sehingga memasuki tahun 1945 Inggris melakukan pemilihan umum untuk meruntuhkan pemerintahan yang dianggap mementingkan perang daripada kesejahteraan rakyat. Akhirnya pemerintahan Winston Churchill yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus perjuangannya yang selalu dikenal dengan sebutan *Dunkirk, The Battle of Britain* harus merasakan kekalahan dari Partai Buruh. (Taylor, 2018)

Pasca perang duni ke dua, Inggris mengalami peningkatan dalam hubungan internasional. Pada tahun 1945 Inggris terpilih menjadi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tahun 1949 mendirikan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) setelah itu 1972 Inggris resmi bergabung *European Economic Community* (EEC). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sektor perekonomian pasca perang dunia dan menstabilkan suasana politik domestik dan internasional. Dalam perang dunia pertama dan kedua, Inggris melakukan penjajahan diberbagai negara seperti Malaysia, India, Pakistan, Singapura dan lain-lainnya untuk mengambil bahan mentah dalam meningkatkan industry di Inggris. Tetapi setelah perang dunia kedua, fokus Inggris dalam pengembalian kekuatan ekonomi dan politik mengharuskan negara-negara jajahannya untuk merdeka agar dapat tergabung kedalam *Commonwealth Countries*. (Habibie, 2013)

Pada tahun 1949 Inggris bersama 7 negara lain, Australia, Kanada, Sri Lanka, South Africa, India, New Zealand dan Pakistan membentuk *Commonwealth of Nations*. Organisasi antar pemerintah ini memiliki visi "*united as free and equal members*" untuk mencapai pada sebuah perdamaian, kebebasan dan kemajuan. Kini *International Governmental Organization* (IGO) tersebut memiliki 53 negara persemakmuran. Keuntungan dalam organisasi ini adalah membentuk hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negaraa anggota, memberikan peluang bagi negara-negara kecil untuk dapat berkomunikasi aktif dengan negara-negara besar dan

terakhir membahas sebuah proyek bersama yang memiliki tujuan pada kemajuan bersama. (Smith, 2018)

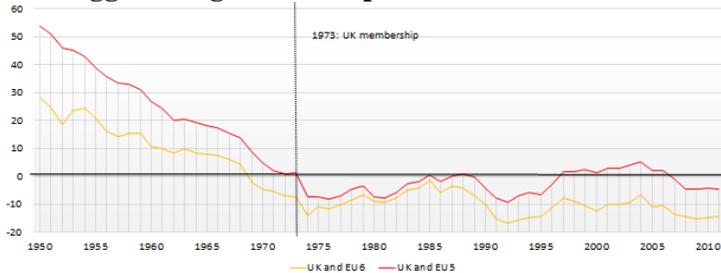
Gambar 3.2
Bendera Commonwealth of Nations



Sumber : www.populationmatters.com
(<https://www.populationmatters.org/report-population-key-controlling-climate-change/commonwealth-flag/>)

Pasca perang dunia kedua Inggris mengalami pasang surut dalam ekonomi dan politik. Sehingga setelah kemenangan partai buruh dalam pemilihan umum 1945, Inggris fokus terhadap pertumbuhan ekonomi dan politiknya yang sudah “*collaps*”. Upaya peningkatakan perekonomian pasca perang dunia, tahun 1945 PDB per kapita Inggris sebesar 90% dan ini merupakan yang terbesar diantara negara-negara pendiri Uni Eropa. Pada tahun selanjutnya 1950, Inggris menolak untuk bergabung dalam *European Coal and Steel Community*. Hasil dari perjanjian Schuman ini dinilai masih kurang menguntungkan bagi Inggris jika ikut bergabung. Karena pada tahun yang sama Inggris dengan enam pendiri Uni Eropa memiliki perbedaan PDB 28%.

Gambar 3.3
Perbedaan Persentase Produk Domestik Burto Antara
Inggris Dengan Uni Eropa Pada Tahun 1950-2010



Sumber : www.voxeu.com

(<https://voxeu.org/article/britain-s-eu-membership-new-insight-economic-history>)

Juli 1961 menjadi titik balik bagi Inggris dalam menegosiasi keanggotaannya dengan *European Community*. Negosiasi ini dilakukan karena melihat PDB perkapita antara Inggris dan enam pendiri Uni Eropa hanya 10%. Oleh sebab itu, negosiasi ini tidak berjalan dengan lancar karena masih ada pertimbangan lainnya dari pendiri-pendiri EEC. Hingga tahun 1963 Presiden Prancis Charles De Gaulle, memveto keanggotaan Inggris. Empat tahun setelahnya, 1967 dengan perbedaan PDB per-kapita 6% Inggris kembali menegosiasikan keanggotaannya untuk kedua kalinya. Namun Usaha Inggris kembali di tolak oleh Prancis. Hingga tahun 1973 dengan PDB per-kapita 7% dibawah para pendiri Uni Eropa, Inggris diterima untuk bergabung dalam Integrasi Eropa. Keinginan Inggris untuk kembali masuk dikarenakan adanya dukungan pada tahun sebelumnya untuk Inggris kembali menegosiasikan keanggotannya serta kemerosotan ekonomi Inggris. (Coricelli, 2015)

Dalam ambisi Inggris untuk dapat mengembalikan stabilitas ekonomi dan politik yang sudah hancur sewaktu perang dunia kedua, tahun 1972 Inggris memutuskan untuk bergabung dengan *European Economic Community* (EEC).

Negara-negara anggota *The Inner Six* Luksemburg, Jerman, Italia, Prancis, Belgia, dan Belanda sukses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dinegaranya. Melihat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dalam negaranya, Inggris meresmikan dirinya sebagai negara anggota Uni Eropa. Keuntungan *Free Trade Area* dalam perdagangan internasionalnya membuat perekonomiannya semakin meningkat pesat. Pada tahun 2016 total persentase yang didapatkan oleh Inggris dari hasil ekspor ke negara-negara anggota UE sebanyak 48%. (Pratiwi, 2017, pp. 31-33)

Setelah Inggris resmi bergabung dalam Integrasi Eropa tahun 1978 pada masa pemerintahan Perdana Menteri James Callaghan, Inggris mengalami kesulitan dalam ekonomi sampai melakukan peminjaman uang dengan IMF. Callaghan merupakan orang yang skeptis terhadap mata uang euro. Meskipun Inggris merupakan anggota EEC, negara kerjaan ini tidak meminta bantuan dana kepada *European Monetary System* (EMS). Mata uang poundsterling masih dianggap terkuat dibandingkan dengan mata uang euro. Sehingga apabila Inggris meminta bantuan kepada EMS akan menyebabkan devaluasi pada mata uangnya.

Tetapi negara-negara Eropa termasuk Inggris mengalami penurunan dalam penghasil pertanian. Sektor pertanian memang tertinggal daripada sektor industri, oleh sebab itu Inggris meminta bantuan kepada *Common Agricultural Policy* (CAP) agar mendapatkan subsidi pemerintah Eropa dalam bidang pangan. Tetapi CAP dan EMS memiliki pengaturan yang sama untuk dapat diaplikasikan ke suatu negara. Oleh sebab itu Inggris memilih untuk meminta bantuan kepada EMS dalam bidang pangan dan tidak ikut dalam pengaturan *Exchange Rate Mechanism*(ERM). (Kurniawati, 2009, pp. 68-70)

Pada tahun 1991 adanya upaya untuk menggunakan mata uang euro diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Namun, Inggris menolak upaya tersebut dan mengajukan klausul-klausul yang menjelaskan bahwa penggunaan mata uang poundsterling dianggap mampu menyeimbangkan ekonomi di

eropa yang notabene menggunakan euro. Poundsterling dinilai sebagai mata uang stabil dalam dunia internasional. Hal ini bertujuan sebagai upaya Inggris untuk menempatkan posisinya pada devaluasi mata uang. Inggris bergabung dengan Uni Eropa terikat dalam bidang *European Economic Area* (EEA). Kerjasama ini menguntungkan Inggris dalam bidang pelayanan, barang, pertukaran tenaga kerja, dan modal dalam pasar internal Uni Eropa. (Sudaryono, 2016, pp. 26-27)

Inggris merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Data yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan april 2017, lima negara yang masuk dalam kategori perkonomian terbaik didunia salah satunya adalah Inggris yang mengisi urutan ke lima (Liputan6, 2017). Inggris yang merupakan negara kerajaan dan penganut sistem Monarki Konstitusional dan sistem perekonimian pasar bebas ini menjadi negara yang fokus terhadap aktivitas ekspor barang seperti alat-alat teknologi, kimia, farmasi, senjata dan perangkat lunak. Dari kegiatan ekonomi yang dilakukan Inggris ini, meraup untung sebanyak USD 518,7 Milliar Dolar atau sekitar 6.889,4 Triliun Rupiah. (Blog, 2017)

Pada tahun 2017 keuntungan yang didapatkan oleh Inggris dalam pasar bebas untuk kawasan Uni Eropa dalam kegiatan ekspor,

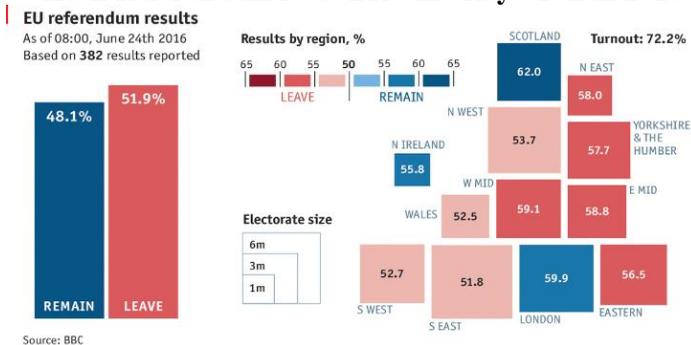
- Mesin termasuk komputer: US \$ 68 miliar (15,3% dari total ekspor)
- Kendaraan: \$ 53,7 milyar (12,1%)
- Bahan bakar mineral termasuk minyak: \$ 35,6 miliar (8%)
- Permata, logam mulia: \$ 32,8 miliar (7,4%)
- Farmasi: \$ 32,8 miliar (7,4%)
- Mesin listrik, peralatan: \$ 28,6 milyar (6,4%)
- Pesawat udara, pesawat ruang angkasa: \$ 21,1 miliar (4,7%)
- Optik, teknis, peralatan medis: \$ 18,1 miliar (4,1%)
- Plastik, barang plastik: \$ 12 miliar (2,7%)
- Bahan kimia organik: \$ 10,3 miliar (2,3%)

Kenaikan pendapatan di tahun 2017 mencapai 82,8% atau sebesar USD 367,5 Milliar. Pendapatan terbesar adalah ekspor bahan bakar minyak termasuk mineral yang naik 38,4% dari tahun 2016 sampai 2017. Pada tingkat kedua dari hasil penjualan emas, platinum, dan berlian sebesar 15,2%. Permata pada posisi ketiga dengan kenaikan 12,8%. (Workman, 2018)

B. Penyebab Referendum Inggris Tahun 2016

Inggris baru saja melakukan referendum pada tanggal 23 Juni 2016. Inggris menganggap bahwa Uni Eropa sudah banyak merugikan ekonomi dan stabilitas negaranya. Referendum dilakukan karena Uni Eropa gagal dalam menyelesaikan masalah yang ada di Uni Eropa yang berimbas pada Inggris. Referendum ini dilakukan oleh David Cameron yang merupakan Perdana Menteri Inggris dari partai *United Kingdom Independence Party* (UKIP). Sebanyak 382 distrik yang terbagi di Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara. Hasil akhir menunjukkan bahwa wilayah selain dari Skotlandia, Irlandia Utara dan London meninggalkan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Gambar 3.4
Hasil Referendum Pada Britania Raya Tahun 2016



Sumber : www.bappenas.go.id

(https://www.bappenas.go.id/files/6114/6736/0666/BREXIT_DAN_PENGARUHNYA_TERHADAP_PEREKONOMIAN_GLOBAL.pdf)

Britain Exit yang disingkat Brexit merupakan fenomena keluarnya Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa. Kejadian ini bermula karena kebijakan dan proyek Uni Eropa menjadi sebuah penghalang kedaulatan negara mereka. Fenomena ini menjadi berita yang kontroversial bagi kawasan Uni Eropa dan dunia internasional. Pasalnya Inggris merupakan negara dengan perekonomian yang cukup stabil. Namun alasan Inggris keluar dari Uni Eropa adalah masalah ekonomi dan gelombang imigran yang tidak terpecahkan. Inggris negara terbesar kedua setelah Jerman dalam menerima imigran untuk masuk ke negaranya. (FKMHII, 2016)

Tantangan yang harus dihadapi oleh Inggris dari keanggotaannya di Uni Eropa mengharuskan Inggris memberi iuran yang besar terhadap Uni Eropa. Besaran iuran yang akan diberikan tidak memiliki standar yang sama. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan finansial akan membayar lebih mahal dibandingkan negara yang lemah dalam ekonomi dan finansialnya. Kebijakan ini dinilai tidak adil diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Upaya dalam pengembangan sektor ekonomi di Inggris sudah diperjuangkan pasca perang dunia kedua. Uni Eropa dianggap tidak dapat membuat negara-negara kecil menyeimbangi kekuatan ekonomi negara-negara besar yang ada di Uni Eropa. Kebijakan dan serta proyek lainnya harus dapat membantu negara-negara kecil dalam mengintegrasikan kekuatan ekonominya di Uni Eropa. (Darmawan, 2016)

Gambar 3.5

Total Iuran Negara-Negara Anggota Uni Eropa Tahun 2015

2015 EU budget 145bn euros: Contributions by country (%)



Source: European Commission/IM Treasury

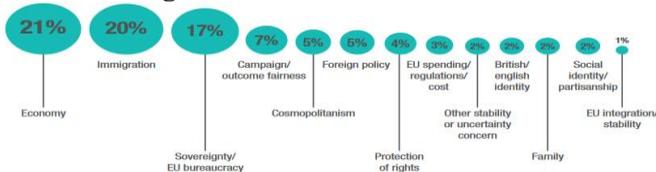
Sumber : www.says.com

(<http://says.com/id/news/7-jawaban-ini-kami-kumpulkan-untuk-membantu-kamu-memahami-brexit-dengan-lebih-mudah>)

Adapun faktor ekonomi yang lain menjadi alasan untuk memilih keluar adalah efek pengangguran di kawasan Uni Eropa. Sejak tahun 2008 kawasan Uni Eropa telah mengalami angka kenaikan pengangguran. Setelah itu, perekonomian dalam kawasan di Uni Eropa mengalami stagnasi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota melambat dan jika terus dilanjutkan akan berimplikasi sampai bangkrut. Orang-orang yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa beranggapan jika Inggris meneruskan keanggotaannya, nasib negaranya akan sama dengan negara-negara eropa lainnya yang lambat laun sudah mengalami kemerosotan dalam perekonomiannya. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak akan menghambat lajur ekspor dan impor negara tersebut. karena bagi Uni Eropa, Inggris memiliki peranan penting dalam kegiatan tersebut. (Mauldin, 2016)

Alasan-alasan yang terkuak dalam publik mengenai referendum yang dilakukan oleh Inggris bukan tentang integrasi Eropa. Faktor utama dalam kasus ini adalah faktor domestik Inggris. Krisis imigran akan membawa kehancuran bagi negara Inggris. Degradasi budaya lokal yang mengakibatkan upaya asimilasi dengan masyarakat pendatang menjadi ancaman sendiri. Data dari *British Election Study*, mengatakan bahwa alasan imigrasi atau masalah kedaulatan Inggris yang menjadi faktor utama dalam Brexit. Masyarakat Inggris yang memilih untuk keluar percaya bahwa meninggalkan Uni Eropa akan membrikan dampak pada penurunan gelombang imigrasi di Inggris. Pasca referendum, masyarakat pro-brexit percaya bahwa Inggris akan menggoreskan prestasi yang lebih banyak dalam dunia internasional karena tidak memiliki ikatan dengan kebijakn-kebijakan Uni Eropa. Dalam prestasi domestiknya, Inggris akan mengurangi dampak pengangguran dan memperkuat tingkat keamanan dalam negeri. (Swales, 2012, pp. 13-14)

Gambar 3.5
Isu-Isu Yang Menentukan Posisi Referendum Uni Eropa



Base: all adults aged 18+ who voted in EU referendums (excluding don't know & no answer), British Election Study Wave 8

Sumber : www.whatukthinks.org
(https://whatukthinks.org/eu/wp-content/uploads/2016/12/NatCen_Brexplanations-report-FINAL-WEB2.pdf)

Kasus imigran merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan untuk melaksanakan referendum di Inggris. Imigran yang masuk kedalam negara Inggris merupakan tantangan tereberat bagi pemerintah dan masyarkat lokal. Hal ini disebabkan pengaruh imigran terhadap budaya sampai identitas nasional terancam.

Memberikan kesempatan bagi imigran untuk masuk merupakan sebuah kesalahan. Terlebih perbatasan yang dipublikasikan sebagai jalur imigran akan berdampak pada kenaikan angka imigran ilegal. Imigran ilegal merupakan sebuah tanda bahaya yang akan mengancam stabilitas nasional. Karena orang-orang yang masuk ke suatu negara dengan predikat ilegal tentu tidak paham mengenai aturan lokal. Fakta lain menyebutkan bahwa mereka dapat dianggap sebagai teroris atau pelaku kriminal yang menjadi wabah yang bersifat menular. (Nizmi, 2016).

Dengan keputusan Inggris untuk keluar sebagai negara anggota Uni Eropa, akan memberikan efek ancaman terhadap imigran yang sudah menetap maupun yang masih berkeinginan masuk. Sehingga dampak yang diharapkan oleh masyarakat pro-brexit akan terjadi di Inggris. Adapun bentuk ancaman pasca referendum kepada imigran yang sudah menetap maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan di Inggris akan dideportasi. Data Reuters CNN 2014 menyebutkan imigran yang berasal dari Eropa Timur untuk mencari pekerjaan tercatat 853 ribu pekerja dari Polandia, 175 ribu dari Rumania dan 155 ribu berasal Lithuania. Jumlah imigran pada tahun 2015 yang datang ke Inggris sebanyak 333 ribu orang dan ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. (Sari, 2016)

Dalam situasi nasional Inggris, adanya kecemburuan sosial yang berawal dari keterbukaan terhadap imigran. Masyarakat lokal tentunya akan bersaing dengan imigran yang datang ke negara mereka dalam fasilitas yang tersedia seperti pendidikan, rumah sakit, rumah dan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, Inggris mengeluarkan kebijakan untuk pengawasan ketat dalam mengatasi masalah imigran yang datang ke negara mereka. Partai Konservatif dengan Partai Buruh sepakat untuk menerapkan *Point Based Immigration System* (PBS) dan menerapkan visa biometric dan kartu identitas untuk warga asing. Elit politik di Inggris juga mengusulkan agar menerapkan kebijakan yang tegas terhadap imigran dengan cara sistem pemulangan langsung apabila warga asing melanggar hukum yang ada di Inggris. Kewenangan khusus juga diberikan kepada polisi perbatasan

untuk menggeledah, menahan, serta bentuk dakwaan langsung terhadap imigran ilegal yang mencoba masuk. (BBC, 2010)

C. Euroscepticism di Inggris dan Kemenangan Partai Konservatif

Kelompok *Euroscepticism* di Uni Eropa memainkan perannya dalam spektrum politik. Konsep yang diciptakan oleh kelompok ini adalah keanggotaan Inggris pada Integrasi Eropa yang mengarah pada sebuah "kecanggungan". Kata *Eurosceptic* pertama kali dikeluarkan oleh Margaret Thatcher dalam surat kabar atas kebijakan Uni Eropa yang tidak disetujuinya. Euroscepticism Inggris dapat didefinisikan sebagai oposisi terhadap persatuan politik, yang mengancam kedaulatan politik dan membayangi manfaat dari kerjasama ekonomi yang penting bagi kepentingan nasional Inggris. Winston Churchill mengatakan dengan sikap konservatifnya:

"Kami memiliki impian kami sendiri dan tugas kami sendiri. Kami dengan Eropa, tapi bukan itu. Kami terhubung tetapi tidak digabungkan. Kami tertarik dan terkait tetapi tidak terserap. Jika Inggris harus memilih antara Eropa dan laut terbuka, dia harus selalu memilih laut terbuka."

Penolakan ini berdasarkan rencana Schuman dalam usulan kerjasama batu bara dan baja bagi kawasan Uni Eropa. Inggris tidak memilih untuk bergabung karena dinilai kerjasama tersebut membuat Inggris terkekang walaupun dijanjikan dengan hasil peningkatan ekonomi. Namun hal tersebut bukan menjadi target utama Inggris. Negara ini lebih memilih jalan sendiri dan menciptakan perdangan karena kedekatan dengan negara Amerika Serikat dan kekuatan dari Negara Kerjaan. Pengaruh *Eurosceptic* di Inggris kian berkembang karena kebangkitan partai UKIP. Pada awalnya UKIP hanya mendapatkan 7% suara dalam pemilu 1999. Namun ditahun 2004 dan 2009 UKIP memperoleh hasil suara 16% dan memenangkan 12 kursi tahun 2004 dan 13 kursi 2009. UKIP berhasil meningkatkan pemilihnya karena selalu mengampanyekan anti-imigran. (Natalia, 2016)

Referendum Inggris merupakan sebuah prestasi yang diupayakan oleh partai konservatif. Partai konservatif ini memenagkan kursi mayoritas dalam pemilihan langsung di Inggris. Melalui kampanye yang disampaikan oleh David Cameron yang saat itu sebagai calon Perdana Menteri Inggris membuat perubahan suasana politik Inggris dan Uni Eropa. Cameron menjanjikan akan mengurangi pajak penghasilan bagi 30 juta rakyatnya, membuka lapangan pekerjaan dan melakukan penghematan untuk mencegah angka defisit pada anggaran. Partai Konservatif mengambil perolehan suara kursi terbanyak dibandingkan partai buruh. Partai David Cameron mendapatkan 316 kursi sedangkan pesaing ketatnya dari partai buruh memperoleh 239 kursi. (Armandhanu, Partai Konservatif Menang Pemilu Inggris, Suara Buruh Anjlok , 2015)

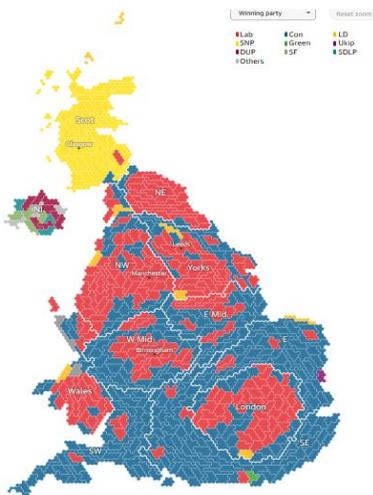
Robert Peel merupakan pendiri partai Konservatif di Inggris pada tahun 1830. Partai Konservatif atau disebut sebagai *Tory Party* menjadi partai yang sudah hadir jauh sebelum Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Partai ini sempat mengalami penurunan drastis karena tidak ada perwakilan yang dapat dikirimkan dalam mengambil kursi parlemen di Inggris. Partai ini kembali menampakan dirinya pada tahun 2005 yang dipimpin oleh Michael Howard memenangkan kursi sebanyak 30 kursi *House of Commons* namun masih belum meendapatkan kursi di parlemen. Oleh sebab itu, Howard mengundurkan diri dan David Cameron menjadi pemimpin yang baru.

Dibawah kepemimpinan Cameron, partai konservatif pada tahun 2010 memenangkan 307 kursi dalam majelis rendah. Pemimpin partai konservatif mengisyaratkan untuk berkoalisi dengan partai Demokrat Liberal yang saat itu memenangkan kursi mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Namun pemimpin partai Demokrat Liberal, Brown mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan penggantinya adalah David Cameron. Hal ini menjadi sebuah kemenangan besar dan awal kebangkitan kembali partai Konservatif di Inggris. Pada tahun-tahun selanjutnya partai Konservatif menjadi partai terbesar hingga saat ini. (Louth, 2018)

Table 3.1
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2015 Di Inggris

PARTY	SEATS	GAIN	LOSS	NET	VOTES	VOTE SHARE%
Conservative	331	38	10	28	11,334,726	36,9%
Labour	232	23	48	-25	9,347,324	30,4%
Scottish National Party	56	50	0	50	1,454,436	4,7%
Liberal Democrat	8	0	49	-49	2,415,862	7,9%
Democratic Unionist Party	8	1	1	0	184,260	0,6%
Sinn Fein	4	0	1	-1	176,232	0,6%
Plaid Cymru	3	0	0	0	181,704	0,6%
Social Democratic and Labour Party	3	0	0	0	99,809	0,3%
Ulster Unionist Party	2	2	0	2	114,935	0,4%
UK Independence Party	1	0	1	-1	3,881,099	12,6%
Green Party	1	0	0	0	1,156,149	3,8%
Independent	1	0	2	-2	98,711	0,3%

Gambar 3.6
Wilayah-Wilayah Pendukung Partai Politik di Inggris.



Sumber : www.theguardian.com

<https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2015/may/07/live-uk-election-results-in-full>

Pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 2015 sekitar 12 partai yang mendapatkan kursi di parlemen Inggris. Partai-partai yang bersaing pada tahun tersebut tetap dimenangkan oleh Partai Konservatif dan disusul oleh rival

tetapnya yaitu Partai Buruh. Dari hasil pemilu 2015, partai Konservatif mendapatkan kursi 331 dan partai Buruh 232 kursi. Partai yang diketuai oleh David Cameron tidak dapat membuat pemerintahan baru karena tidak mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Tetapi dengan perolehan 331 suara, Cameron mendapatkan kursi sebagai Perdana Menteri Inggris. (Matt Osborn, 2015) Tetapi Cameron memilih mengundurkan diri sebagai ketua partai Konservatif sekaligus Perdana Menteri dan digantikan oleh Theresa May. (Muhajir, 2016)